

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Batas administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di pulau Jawa bagian tengah, di bagian selatan dibatasi lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- 1) Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- 2) Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- 3) Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- 4) Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut

Secara administrasi D.I.Yogyakarta terbagi dalam 4 kabupaten dan 1 kota dengan 78 kecamatan serta 438 Desa/Kelurahan definitif (BPS, DIY 2010).

Dengan perincian

- a) Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa
- b) Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa
- c) Kabupaten Kulonprogo terdiri atas 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa
- d) Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa
- e) Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.

2. Luas wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantar $7^{\circ} .33' - 8^{\circ} .12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.00' - 110^{\circ}.50'$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas

3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:

- 1) Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%)
- 2) Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%)
- 3) Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km² (18,40%)
- 4) Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%).
- 5) Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%).

Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 km² luas D.I. Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% Regosol, 12,38% Lathosol, 10,97% Grumusol, 10,84% Mediteran, 3,19% Alluvial, dan 2,48% adalah tanah jenis Rensina.

Sebagian besar wilayah D.I. Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m, 5,04% wilayah dengan ketinggian antar 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian diatas 1000 m.

3. Iklim

Daerah Istimewa Yogyakarta beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan.

Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, suhu udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2014

menunjukkan rata-rata $26,3^{\circ}\text{C}$ lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2013 yang tercatat sebesar $26,08^{\circ}\text{C}$, dengan suhu minimum $21,2\text{ C}$ dan suhu maksimum $32,7$. Curah hujan perbulan sekitar $169,0\text{ mm}$ dengan hari hujan per bulan 13 kali. Sedangkan kelembaban udara tercatat antara 42,0 persen-100,0 persen, tekanan udara $1.010,1\text{ bm}- 1.019,9\text{ mb}$, dengan arah angin Barat Daya dan kecepatan angin antara 0,2 knot sampai dengan 15,0 knot. (DIY dalam angka, 2015).

Peta Daerah Istimewa Yogyakarta



4. Kependudukan

Berdasarkan hasil Susenas Agustus 2014 jumlah penduduk DIY tahun 2014 tercatat 3.666.533 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,47 persen dan penduduk perempuan 50,53 persen. Menurut hasil proyeksi penduduk

kota mencapai 66,74 persen dan penduduk desa mencapai 33,26 persen.

Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 mencapai 0,98 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni 0,82 persen.

Dengan luas wilayah 3.185,80 km^2 . Kepadatan tertinggi terjadi di kota Yogyakarta yakni 12.322 jiwa per km^2 dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63 persen memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 470 jiwa per km^2 .

Menurut angka proyeksi penduduk 2010-2035, komposisi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 8,56 persen.

Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 37,80 persen, kelompok umur 25-59 tahun 49,00 persen, dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,20 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tinggi usia harapan hidup penduduk DIY yang mencapai 74.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 tumbuh sebesar 5,18%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,40%.

Perekonomian DIY tahun 2014 tumbuh mengesankan karena hampir semua sektor tumbuh positif. Sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 8,97%, di susul sektor jasa pendidikan, real estate, jasa kesehatan, dan pendidikan sosial, jasa perusahaan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, jasa lainnya, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas serta sektor pertambangan dan penggalian, yaitu 7,91% sampai dengan 2,11%. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh negatif 2,13%.

Berdasarkan perkembangan komposisi nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa peran sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin tergeser oleh sektor lain.

Pada tahun 2013, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten/kota masih yang tertinggi untuk kabupaten Kulonprogo dan kabupaten Gunungkidul. Sementara untuk kabupaten Bantul, kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta kontribusi terbesarnya adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Perbedaan ini disebabkan karena pada setiap kabupaten/kota memiliki struktur ekonomi yang berbeda.

B. Perkembangan Variabel Penelitian

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta.

Pembangunan manusia menjadi isu utama yang mewarnai proses pembangunan sosial ekonomi di level nasional maupun regional selama lebih dari dua dekade terakhir. Pemerintah Republik Indonesia dalam sekup nasional maupun regional sangat gencar melaksanakan program pembangunan yang menyangkut pembiayaan untuk mengangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah. Program yang bersifat intervensi dianggap sangat perlu mengingat terbatasnya akses penduduk miskin terhadap faktor-faktor produksi maupun layanan pendidikan dan kesehatan. Untuk mengevaluasi perkembangan pencapaian pembangunan tersebut dibutuhkan sebuah indikator yang mampu merangkum semua aspek dari pembangunan manusia dan salah satu indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia yang mencerminkan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara umum, kualitas pembangunan manusia yang tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta dan di ikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebaliknya, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul selama satu dekade terakhir

selalu berada di peringkat terakhir. Pencapaian IPM diseluruh kabupaten di D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2014 termasuk dalam kategori "menengah sedang" atau memiliki nilai IPM antara 66-80, bahkan khusus untuk Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori "tinggi" karena memiliki nilai IPM di atas 80 pada tahun 2013 dan 2014. (Statistik D.I.Yogyakarta, 2014). Berikut adalah tabel mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta dalam kurun waktu 2008 hingga tahun 2014.

Tabel 4.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
di D.I.Yogyakarta Tahun 2008-2014

Kabupaten/ Kota	Tahun					Max	Min	Rata- rata
	2008	2009	2011	2013	2014			
Kulonprogo	68,05	68,49	69,53	70,14	70,68	70,68	68,05	69,35
Bantul	74,38	74,84	75,79	76,78	77,11	77,11	74,38	75,76
Gunungkidul	62,75	63,47	64,83	66,31	67,03	67,03	62,75	64,89
Sleman	79,24	79,47	80,04	80,26	80,73	80,73	79,24	79,93
Yogyakarta	82,17	82,45	82,98	83,61	83,78	83,78	82,17	83,00
DIY	74,78	75,12	75,93	76,44	76,81	76,81	74,78	75,80

Sumber: BPS D.I.Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2008-2014, kemajuan yang dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembangunan manusia cukup signifikan. Angka Indeks Pembangunan Manusia DIY mengalami peningkatan cukup berarti dari 68,05 pada tahun 2008 menjadi 68,49 pada tahun 2009 dan terus meningkat menjadi 75,93 pada tahun 2011, hingga tahun 2014 IPM Daerah Istimewa

Yogyakarta terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,81. Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 76,81, dan nilai IPM terendah DIY dalam kurun waktu 2008-2014 terjadi pada tahun 2008 sebesar 68,49. Apabila dilihat per kabupaten/kota, kota Yogyakarta mempunyai angka IPM relatif lebih tinggi di bandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 83,78 pada tahun 2014. Kemudian disusul oleh Kabupaten Sleman mencapai angka 80,73, Kabupaten Bantul sebesar 77,11, Kabupaten Kulonprogo sebesar 70,68 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 67,03.

2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta.

Salah satu indikator dalam kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang dihasilkan pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. PDRB adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam satu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan

output riil.

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, perekonomian D.I.Yogyakarta tahun 2014 tumbuh sebesar 5,18%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,40% (BPS D.I.Yogyakarta 2014). Berikut adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 di D.I.Yogyakarta dalam kurun waktu 2008-2014.

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2014
(Persen)

Kabupaten/ Kota	Tahun					Max	Min	Rata- rata
	2008	2009	2011	2013	2014			
Kulonprogo	4,71	3,97	4,95	5,05	4,53	5,05	3,97	4,42
Bantul	4,90	4,47	5,27	5,57	5,25	5,57	4,47	5,03
Gunungkidul	4,39	4,14	4,33	5,16	4,71	5,16	4,14	4,45
Sleman	5,13	4,48	5,19	5,70	5,23	5,70	4,48	5,03
Yogyakarta	5,12	4,46	5,64	5,64	5,46	5,64	4,46	5,19
DIY	5,03	4,43	5,16	5,40	5,09	5,40	4,43	4,95

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menjelaskan bahwa laju pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2008-2014 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 5,03%, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 4,43%, dan kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2013 menjadi sebesar 5,40%, namun pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan

menjadi 5,09%. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2008-2014 sebesar 4,95%.

Perbandingan nilai nominal pertumbuhan PDRB antarwaktu dan antar daerah menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan PDRB terbesar secara relatif, sedangkan Kabupaten Kulonprogo merupakan Kabupaten dengan nilai PDRB terkecil. Pada tahun 2014, kontribusi Kota Yogyakarta terhadap total PDRB provinsi mencapai 5,46%, kemudian diikuti Kota Kabupaten Sleman sebesar 5,23%, Kabupaten Bantul sebesar 5,25%, Kabupaten Gunungkidul sebesar 4,71% dan Kabupaten Kulonprogo sebesar 4,53%.

3. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, derajat kesehatan yang rendah serta buruknya lingkungan hidup. Kemiskinan tidak lagi dipandang sebatas kemampuan ekonomi, tetapi kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar yang mengakibatkan perlakuan yang berbeda dalam menjalankan kehidupan secara bermatabat. Oleh karena itu pemerintah berupaya keras untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut sehingga pembangunan dilakukan secara terus menerus tidak hanya upaya pembangunan ekonomi tetapi juga pembangunan manusia. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang

meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Berikut data penduduk miskin di Kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta.

Tabel 4.3
Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta
Tahun 2008-2014 (Persen)

Kabupaten/ Kota	Tahun					Max	Min	Rata- rata
	2008	2009	2011	2013	2014			
Kulonprogo	26,85	24,65	23,62	21,39	20,64	26,85	20,64	24,02
Bantul	18,54	17,64	17,28	16,48	15,89	18,54	15,89	17,29
Gunungkidul	25,96	24,44	23,03	21,70	20,83	25,96	20,83	23,70
Sleman	12,34	11,45	10,61	9,68	9,50	12,34	9,50	10,91
Yogyakarta	10,81	10,05	9,62	8,82	8,67	10,81	8,67	9,61
DIY	18,02	16,86	16,14	15,03	15,00	18,02	15,00	16,44

Sumber: BPS D.I.Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2008-2014 penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tersebut (2008-2014) penduduk miskin tercatat paling sedikit pada tahun 2014 yaitu sebesar 15.00% dan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2008 sebesar 18,02%. Rata-rata jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2008-2014 sebesar 16,44%. Apabila dilihat perkabupaten pada tahun 2008 yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak adalah Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar yaitu sebesar 26,85%, dan yang memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah kota Yogyakarta sebesar 10,81%. Hingga tahun 2014 kota Yogyakarta masih menjadi daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin paling

sedikit yaitu sebesar 8,67% dan yang memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak pada tahun 2014 adalah kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 20,83%.

4. Perkembangan Belanja Modal di Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta.

Kebijakan fiskal merupakan bagian pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) (Sukirmo. 2000) dalam Pratowo (2013), adalah suatu tindakan untuk mengukur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional.

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Berdasarkan data RAPBD D.I.Yogyakarta tahun 2014, rencana penerimaan daerah tercatat sebesar Rp.3,10 triliun. Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 39,80%, dari dana perimbangan sebesar 33,50%, serta dari penerima lainnya yang sah sebesar 26,70%. Sedangkan rencana anggaran belanja tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 3,33 triliun. Pengeluaran untuk

belanja tidak langsung merupakan bagian terbesar yaitu mencapai 46,46% dari total pengeluaran terutama untuk belanja pegawai 15,78%.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarnya dengan aset tetap lain dan membeli. Berikut adalah data belanja modal di D.I.Yogyakarta tahun 2008-2014.

Tabel 4.4
Belanja Modal Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta
Tahun 2008-2014 (Miliar Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	DIY
2008	88.391.293	297.895.851	132.215.887	76.068.763	97.071.539	210.233.088
2009	74.030.784	123.429.509	98.742.105	109.127.264	98.302.114	206.074.762
2010	42.169.957	67.528.051	104.126.013	65.333.081	58.269.581	131.691.395
2011	77.092.699	90.931.988	143.140.813	145.735.877	71.351.993	150.173.519
2012	138.686.254	127.093.638	190.308.088	130.674.475	82.971.999	217.958.664
2013	118.396.936	146.796.969	179.342.085	201.672.190	121.557.113	292.505.411
2014	152.465.373	289.887.759	160.375.383	311.278.754	269.821.343	399.119.628

Lanjutan Tabel 4.4

Max	152.465.373	297.895.851	190.308.088	311.278.754	269.821.343	399.119.628
Min	42.169.957	67.528.051	98.742.105	65.333.081	58.269.581	131.691.395
Rata-rata	80.923.343	127.013.511	118.611.604	121.533.211	98.311.060	190.984.200

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa belanja modal secara nominal di D.I.Yogyakarta dalam kurun waktu 2008-2014 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2008 belanja modal di DIY sebesar Rp.210.233.088 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.206.074.762 miliar dan pada tahun 2010 turun menjadi Rp.131.691.395 miliar, dan pada tahun 2011 kembali meningkat sebesar Rp.150.173.519 miliar, dan terus meningkat hingga tahun 2014 menjadi sebesar Rp.399.119.628 miliar. Pengeluaran pemerintah dalam belanja modal dalam kurun waktu 2008-2014 paling besar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.399.119.628 miliar, dan pengeluaran pemerintah dalam belanja modal paling kecil terjadi pada tahun 2008 yakni hanya sebesar Rp210.233.088 miliar. Rata-rata belanja modal di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2008-2014 sebesar Rp190.984.200 miliar. Kabupaten yang belanja modalnya paling besar tahun 2014 adalah kabupaten Sleman sebesar Rp311.278.754 miliar kemudian disusul oleh kabupaten Bantul sebesar Rp289.887.759 miliar, kota Yogyakarta sebesar Rp269.821.343, kabupaten Gunungkidul sebesar Rp160.375.383 miliar, dan yang terakhir adalah kabupaten Kulonprogo sebesar Rp152.465.373 miliar.